

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi konsep lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs cenderung melibatkan banyak pihak meliputi organisasi sipil ataupun organisasi lain dibanding dengan konsep MDGs sebelumnya (Pratama, Purnomo, & Agustiyara, 2020). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu konsep pembangunan berskala dunia yang bersifat universal tanpa membedakan antara negara berkembang dan negara maju. Hal tersebut sebagai bentuk dari kepedulian bersama guna membangun visi global bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan kewajiban bagi seluruh dunia (Zaini, Muhammad, Latief, Haris, & Arifin, 2021). Prinsip moral SDGs berprinsip bahwa tidak ada satupun negara yang berada pada kondisi tertinggal sementara negara lain mengalami kesejahteraan. Hal tersebut berarti setiap individu dan negara memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan visi global mengenai SDGs (Osborn, Cutter, & Ullah, 2015).

SDGs atau pembangunan berkelanjutan mempunyai 17 tujuan yang telah ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disahkan dan dihadiri oleh 193 negara termasuk salah satunya negara Indonesia diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai capaian pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Salah satu tujuan dari konsep SDGs adalah tanpa kemiskinan/*no poverty* (Trimulato, Syamsu, & Octaviany,

2021). Kemiskinan menjadi masalah serius yang dihadapi dunia saat ini (Latifah, 2011). Pengentasan kemiskinan berkaitan dengan tidak adanya kelaparan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan tujuan yang lain dapat terselesaikan apabila kemiskinan dapat dikurangi (Pratama et al., 2020). Sebagai lanjutan dari konsep MDGs yang dinilai dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, isu kemiskinan masih menjadi salah satu tujuan dari konsep SDGs.

Suatu kondisi dimana terdapat keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dari segi ekonomi diiringi dengan banyaknya jumlah penduduk yang pengangguran sehingga menimbulkan adanya ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan antarmasyarakat di dalamnya merupakan kondisi yang menggambarkan kemiskinan (Saragih, 2015). Kemiskinan dikaitkan dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan bahkan politik.

Kemiskinan muncul disebabkan oleh faktor internal yang meliputi kebutuhan yang harus segera dipenuhi tetapi tidak mempunyai kemampuan yang cukup pengelolaan sumber daya yang dimilikinya seperti keterampilan yang tidak memadai dan tingkat pendidikan yang masih minim. Sementara itu, faktor eksternal penyebab kemiskinan dapat terjadi karena adanya bencana alam meliputi krisis ekonomi. Tidak adanya kebijakan yang berpihak dan memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin menjadi faktor eksternal dari penyebab kemiskinan (Byres, 1984).

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang hadir dalam pengesahan SDGs

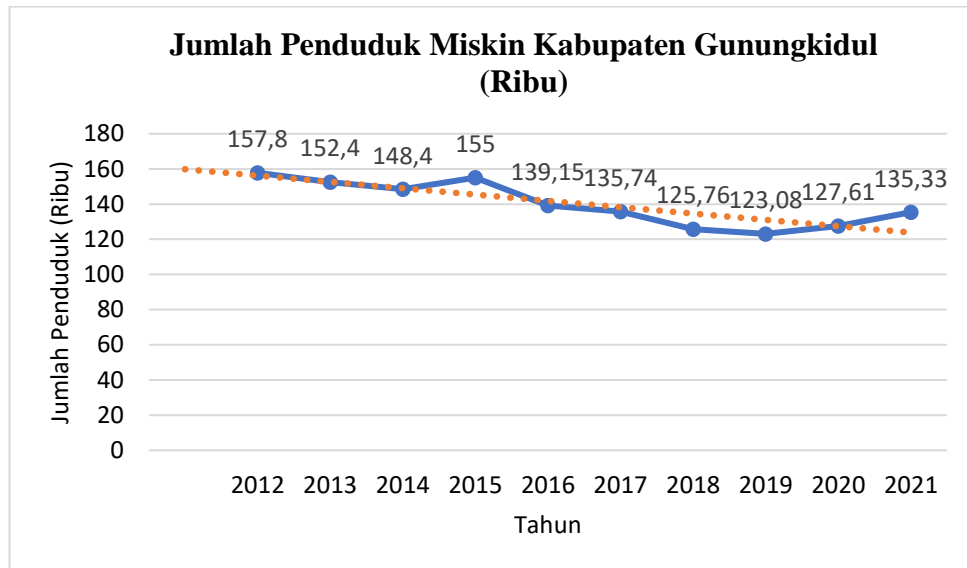
sehingga ikut serta berkomitmen dalam upaya menanggulangi kemiskinan sebagai upaya memperkuat konsep SDGs. Indonesia termasuk negara yang menjadikan kemiskinan sebagai beban berat dan masih menjadikan permasalahan kemiskinan sebagai masalah yang serius (Sampedro, 2021). Kemiskinan juga menjadi isu prioritas nasional di Indonesia.

Tidak hanya dilingkup negara, permasalahan kemiskinan juga terdapat di lingkup daerah provinsi maupun di daerah kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu daerah yang menjadikan kemiskinan sebagai isu sentral adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diantara provinsi lain di Pulau Jawa, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada urutan pertama sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa dengan persentase 11,91%, Jawa Tengah 11,25%, Jawa Timur 10,59%, Jawa Barat 7,97%, Banten 6,5%, dan terakhir DKI Jakarta 4,67% (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021).

Salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadikan kemiskinan sebagai isu sentral adalah Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten yang menjadikan kemiskinan sebagai masalah yang serius. Hal tersebut dikarenakan diantara 4 (empat) kabupaten lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul memiliki angka kemiskinan cukup tinggi setelah Kabupaten Bantul. Angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul berada dikedudukan kedua termiskin setelah Kabupaten Bantul (BPS Provinsi D.I.

Yogyakarta, 2021). Berikut merupakan grafik data angka kemiskinan berdasarkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul:

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul (Ribu)



Sumber : (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2022)

Gambar 1 merupakan angka kemiskinan pada kurun waktu tahun 2012-2021 di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi terjadi penurunan dan kenaikan pada jumlah penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan terjadi pada tahun 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sementara itu, kenaikan kemiskinan terjadi pada tahun 2015 mengalami kenaikan 6,6 ribu, 2020 mengalami kenaikan sebesar 4,53. Kenaikan kemiskinan tersebut disebabkan adanya peningkatan angka pengangguran sebesar 2,90% dan adanya gini ratio (ketimpangan) distribusi pendapatan sebesar 0,31%. Dari tahun 2020 juga terdapat kenaikan penduduk miskin sebesar 7,72 ribu. Dari

data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Gunungkidul lebih dominan dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Dilihat pula dari grafik *trendline* yang cenderung menurun.

Sebagai isu yang menjadi salah satu tujuan dari konsep SDGs, kemiskinan harus ditanggulangi. Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan konsep SDGs, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 juga mengatur tentang penekanan angka kemiskinan yang menjadi agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan (National Development Planning Agency (Bappenas), 2020). Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan guna memperkuat konsep SDGs.

Melalui Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang diberikan kewenangan untuk mengentaskan masalah kemiskinan guna memperkuat SDGs, terdapat regulasi yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan membahas tentang pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat. Sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dan kabupaten/kota (Kominfo, 2011). Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi

dan Kabupaten/Kota tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik ditingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota merupakan lembaga lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yang dibentuk untuk mengatasi kemiskinan baik ditingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tim tersebut dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan yang menjadi fokus prioritas nasional.

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan sebagai wujud pembangunan berdasarkan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Kabupaten Gunungkidul membentuk suatu lembaga yang bertugas untuk menanggulangi kemiskinan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan surat keputusan bupati Gunungkidul SK Bupati No.23/KPTS/TIM/2011 terkait pembentukan TKPKD Kabupaten Gunungkidul. Surat keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 (Kominfo, 2011). Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 55 tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 2 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan pada bab 1 membahas tentang kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Sebagai upaya optimalisasi strategi penanggulangan kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten

Gunungkidul dibentuk sebagai lembaga koordinasi untuk menanggulangi kemiskinan ditingkat kabupaten dengan tujuan untuk mempercepat proses pengurangan jumlah penduduk miskin di daerah Kabupaten Gunungkidul. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul dibentuk untuk menekan angka kemiskinan sebagai wujud penguatan SDGs. Dengan terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul sejak diberlakukannya SK Bupati Gunungkidul No. 23/KPTS/TIM/2011 terkait pembentuk TKPKD Kabupaten Gunungkidul, dilihat dari tahun 2012 hingga 2021 Kabupaten Gunungkidul cenderung mengalami penurunan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait strategi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin untuk memperkuat SDGs di Kabupaten Gunungkidul.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti diatas, Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: **Bagaimana strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam menanggulangi kemiskinan untuk memperkuat SDGs di Kabupaten Gunungkidul.**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah masalah yang ada, tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah dalam menanggulangi kemiskinan untuk memperkuat SDGs di Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan baru dan dapat menjadi acuan untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya terkait strategi kelembagaan daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi lembaga terkait untuk kebijakan selanjutnya.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi kepada pembaca terkait lembaga TKPKD Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi kemiskinan untuk memperkuat SDGs.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap permasalahan yang dihadapi secara nyata.

1.5. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian yang mendalam, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai studi pustaka untuk menghindari plagiasi dan duplikasi penelitian sebelumnya serta untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ke tahapan selanjutnya.

Penelitian terdahulu juga menjadi referensi dan rujukan penulis terkait dengan penelitian yang diteliti. Berikut tabel penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Azhari, 2022)	Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Pekanbaru	Penelitian ini membahas tentang implementasi dari strategi pengembangn usaha yang dilakukan TKPK Provinsi Riau melalui pengembangan UMKM dalam pengentasan kemiskinan. Lemahnya peran dan kontribusi TKPK Provinsi Riau serta koordinasi dengan <i>stakeholder</i> yang kurang membuat tidak terlaksana penuh dalam menjalankan setiap programnya.
2.	(Santoso, Vely, Siswanto, & Setyaningsih, 2022)	Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Melalui Integrasi	Penelitian ini membahas tentang sinergi yang dilakukan antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan melalui integrasi program kegiatan

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Program Antar OPD	dan Kerjasama antar OPD yang dilakukan dalam bentuk <i>Forum Group Discussion</i> yang menghasilkan 2 agenda utama berupa penjaminan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi.
3.	(Yendra, 2021)	Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Isu Sustainable Development Goals (SDGs) Se-Kabupaten Sleman	Penelitian ini membahas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang menjadi forum komunikasi sekaligus tempat koordinasi keluarga terpadu. LKS POSDAYA menjalankan fungsinya atas kemampuan dan swadaya masyarakat sebagai upaya pemberdayaan keluarga sejahtera. Posdaya sebagai instrument yang dapat menjadi solusi penyelesaian kemiskinan melalui pemberdayaan keluarga terpadu.

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	(Alfisyahrin, 2021)	Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang	Penelitian ini membahas tentang masih perlunya optimalisasi dalam penyusunan program dan pemantauan pelaksanaan program oleh TKPKD Kota Semarang. Penataan pengelolaan data kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh sehingga dapat terwujud data yang terpadu yang berdampak positif kepada masyarakat Kota Semarang.
5.	(Sari & Indrawati, 2021)	Implementasi SDGs dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Temanggung	Penelitian ini membahas tentang keberhasilan pemerintah Kabupaten Temanggung serta TKPKD Kabupaten Temanggung dalam mengurangi kemiskinan. TKPKD berfokus pada perbaikan program perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p> miskin, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, dan lainnya. Lembaga non pemerintah ikut serta berpartisipasi seperti Lembaga Swasta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) dan ormas seperti BAZNAS dan LAZIS. </p>
6.	(Susilowati, 2018)	<p> Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2017 </p>	<p> Penelitian ini membahas capaian serta permasalahan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kediri tahun 2017. Terdapat tim untuk menanggulangi kemiskinan yaitu TKPKD yang membuat program rapat koordinasi dan memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh swasta/mandiri (swadaya masyarakat). Terdapat </p>

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			evaluasi kinerja tim yang harus ditingkatkan.
7.	(Fadilla, 2017)	Analisis Kebijakan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Tangerang Provinsi Banten	Penelitian ini membahas kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang Provinsi Banten melalui TKPK yang melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Koordinasi meliputi sinkronisasi, harmonisasi, integrasi antar SKPD, institusi baik vertikal ataupun horizontal.
8.	(Syaripulloh, 2017)	Pelaksanaan Tupoksi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Penelitian ini membahas tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak yang telah membentuk kelompok kerja meliputi Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi tentang masyarakat miskin,

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, dan Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh TKPK meliputi komunikasi, penyiapan sumber daya, disposisi, pembagian kewenangan struktur birokrasi yang melibatkan SKPD dan pihak swasta.</p>
9.	(Syaputra, 2016)	<p>Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta</p>	<p>Penelitian ini membahas Lembaga Amil Zakat (LAZISMU) berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Lazismu melakukan Kerjasama dengan lembaga Muhammadiyah untuk sasaran kegiatan yang lebih luas dengan</p>

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			membuat program yang terperinci dalam meningkatkan ekonomi agar angka kemiskinan dapat menurun.
10.	(Afriyandi, 2015)	Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok Usaha Bersama; Sebuah Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural	Penelitian ini membahas peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis kelompok usaha bersama (KUBE) sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. LKM KUBE dinilai sangat efektif dilakukan karena keberadaannya diterima langsung oleh kelompok usaha skala mikro baik dari aspek permodalan usaha dan juga program pendampingan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat yang positif berdampak pada kesejahteraan.

Dilihat dari kajian sebelumnya di atas, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini mempunyai titik fokus pada kelembagaan

husus untuk menanggulangi kemiskinan guna memperkuat konsep pembangunan berkelanjutan melalui strategi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini berfokus pada penguatan SDGs melalui kelembagaan penanggulangan kemiskinan. Pada penelitian sebelumnya belum ditemukan penelitian terkait kelembagaan khusus yang menangani kemiskinan guna memperkuat konsep SDGs. Selain itu, terdapat perbedaan dari teori yang digunakan, topik pembahasan, lokasi penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Strategi

1) Pengertian Strategi

Strategi menjadi suatu langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Strategi dapat juga diartikan sebagai rencana yang tepat terkait kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut George (dalam Triono & Warsita, 2019) strategi berasal dari bahasa Yunani dari kata *strategos* yang artinya jenderal. Kata jenderal diartikan sebagai suatu yang menjadi perhatian utama pada manajemen puncak organisasi. Secara khusus strategi menjadi penempatan misi perumusan kebijakan dan strategi tertentu guna mencapai sasaran yang hendak dituju serta memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi dapat tercapai.

Menurut Potter dalam Arifin, 2017) strategi adalah sebuah seni dan ilmu dari pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi (*evaluating*) keputusan strategis. Strategi merupakan sebuah perencanaan atau pendekatan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Adawiyah, 2018). Menurut (Yunus, 2016) strategi dikatakan sebagai suatu perencanaan tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain guna menanggapi lingkungan dan membantu organisasi untuk mencapai sasarannya.

Jadi, strategi dapat disimpulkan merupakan suatu cara untuk melakukan langkah ke depan guna mencapai tujuan untuk membangun visi dan misi organisasi, tujuan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai dan tepat sasaran.

2) Bentuk-bentuk Strategi

Menurut Porter (dalam Muiz, 2018) suatu organisasi atau lembaga menggunakan suatu strategi dengan jenis yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut:

- a. Strategi *overall cost leadership*, berjalan dengan menjadi produsen dengan biaya terendah dalam industri yang bersangkutan. Strategi ini memberikan tingkat pengembalian di bawah rata-rata industri guna untuk menghalangi pesaing baru yang masuk di dalam industrinya

- b. Strategi diferensiasi, dilakukan dengan melahirkan kesan produk yang dihasilkan berbeda. Perusahaan atau lembaga akan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata sehingga akan mengurangi sensitifitas terhadap produk yang dihasilkan
- c. Strategi konsentrasi, suatu organisasi atau lembaga harus mempertahankan sumber daya baik sarana, prasarana, sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Program perbaikan bertujuan agar sarana prasarana dapat berjangka Panjang. Sementara program pelatihan menjadi sarana untuk mengasah kemampuan sumber daya manusia. Program kompensasi menjadi fokus pertahanan sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Berdasarkan prinsipnya, Kotten membagi strategi berdasarkan tipenya ke dalam empat tipe strategi (Salusu, 2006) yaitu:

- a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi organisasi berkaitan dengan perumusan strategi melalui visi dan misi suatu pemerintah daerah atau instansi yang dituangkan ke dalam suatu program atau kegiatan-kegiatan. Aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi organisasi dapat dilihat berdasarkan visi dan misi.

- b. *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi program memiliki fokus pada keterlibatan strategi dari suatu program. Aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi

program meliputi apakah strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau instansi akan memberikan dampak positif bagi instansi maupun masyarakat, atau akan memberikan dampak negatif bagi instansi atau masyarakat. Strategi program juga dapat diartikan sebagai upaya mewujudkan program dan kegiatan yang sudah dibuat.

c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi ini memusatkan sumber daya dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang ada di dalam suatu pemerintah daerah atau instansi untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Aspek-aspek yang dapat dilihat dari strategi pendukung sumber daya meliputi:

a) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana meliputi benda maupun alat yang digunakan guna kelancaran atau kemudahan dalam melakukan pekerjaan dari pemerintah daerah ataupun instansi yang bersangkutan.

b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah asset atau modal non-material yang harus tersedia dengan baik agar terwujudnya tujuan dari instansi. Sumber daya manusia menjadi kunci

peenggerakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dari suatu instansi.

c) Sumber Daya Finansial

Mencakup ketersediaan finansial dalam suatu instansi.

Keuangan menjadi salah satu faktor penting dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi.

d. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Kekuatan strategi suatu instansi atau lembaga dalam menghadapi suatu permasalahan terletak pada pemanfaatan secara maksimal dari unsur kelembagaan yang berupa aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggungjawab, dan kewenangan yang mendukung pelaksanaan program atau kegiatan pada suatu instansi. Strategi ini memiliki fokus dalam mengembangkan kemampuan organisasi untuk melakukan inisiatif strategi.

3) Tingkatan Strategi

Menurut Salusu strategi dibagi ke dalam tiga tingkatan strategi yang ada dalam lembaga publik yaitu sesuai dengan tingkatan manajemen yaitu manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah (Salusu, 2006). Ketiga tingkatan strategi tersebut meliputi:

a. Strategi Organisasi

Grand strategy, meliputi rumusan visi, misi, nilai-nilai, rencana jangka panjang.

b. Strategi Departamental

Mengatur hubungan visi dengan rencana operasional dan mengatur koordinasi sebaik mungkin.

c. Strategi Fungsional

Strategi fungsional juga biasa disebut sebagai strategi operasional yang mana memusatkan pada pemanfaatan sumber daya dengan efektif dan efisien.

1.6.2. Kemiskinan

1) Pengertian Kemiskinan

Kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata penduduk di suatu wilayah adalah kemiskinan. Permasalahan kondisi tersebut ditandai dengan kapasitas penghasilan yang rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Kemampuan pendapatan yang rendah juga berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata termasuk standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan (Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020). Kemiskinan menjadi permasalahan mendasar karena kemiskinan melibatkan pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan merupakan permasalahan global (Yacoub, 2012).

Menurut Chambers (dalam Suryawati, 2005) kemiskinan merupakan suatu *integrated concept* yang mempunyai lima dimensi meliputi kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan

menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Menurut Rejekiningsih (dalam Jacobus, Kindangen, & Walewangko, 2019) Kemiskinan merupakan kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan tuntutan kehidupan yang paling minimum baik aspek konsumsi dan pendapatan sehingga untuk menanganinya membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan.

2) Bentuk-bentuk Kemiskinan

Kemiskinan dapat dibagi menjadi empat bentuk (Suryawati, 2005)

meliputi:

- a. Kemiskinan absolut, kemiskinan yang terjadi jika pendapatan masyarakatnya di bawah garis kemiskinan atau tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan dipengaruhi oleh adat istiadat, iklim, kemajuan teknologi, dan faktor lainnya.
- b. Kemiskinan relatif, kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan dan kemiskinan berhubungan positif yang artinya semakin besar ketimpangan antara masyarakat golongan atas dengan masyarakat golongan bawah, maka semakin besar juga jumlah penduduk suatu negara dikatakan miskin.

- c. Kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak memiliki usaha untuk memperbaiki tingkat hidup, pemalas, boros, tidak kreatif.
- d. Kemiskinan struktural, kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang ada pada suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tetapi sering menyebabkan kemiskinan semakin banyak.

3) Indikator Penduduk Miskin

Suatu kondisi dapat dikatakan mengalami kemiskinan diukur berdasarkan beberapa indikator. Menurut Adisasmita (dalam Ferezagia, 2018) indikator yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, kematian rata-rata usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat kesuburan, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam (Mutiarin & Khadafi, 2017) kemiskinan dalam masyarakat dihitung berdasarkan garis kemiskinan dengan masyarakat yang berpenghasilan dibawah US\$1,7 orang per hari. Angka tersebut ditetapkan berasal dari kebutuhan makanan dan non

makanan. Menurut *World Bank* dalam (Mutiarin & Khadafi, 2017) penetapan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita penduduk yang kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional.

1.6.3. Sustainable Development Goals (SDGs)

1) Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan menjadi agenda pembangunan nasional secara global yang pertama kali diusulkan oleh Pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala, dan Uni Emirat Arab pada tahun 2012. Harapan dibentuknya SDGs guna melanjutkan agenda sebelumnya yaitu MDGs sebelumnya dengan memberikan transformasi yang akan membentuk perkembangan global yang dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang (Sutopo, Arthati, & Rahmi, 2014).

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pemulihan kondisi lingkungan yang hancur tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan merupakan suatu konsep pembangunan berskala dunia yang bersifat universal tanpa membedakan antara negara berkembang dan negara maju. Hal tersebut sebagai bentuk dari kepedulian bersama guna membangun visi global bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan kewajiban bagi seluruh dunia (Zaini et al., 2021).

SDGs menjadi konsep lanjutan dari MDGs (*Millenium Development Goals*) yang berakhir tahun 2015 dan disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi pembangunan berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Disinilah SDGs disahkan untuk dilakukan dari tahun 2015-2030 mendatang (Wahyuningsih, 2017).

Konsep SDGs mempunyai tiga pilar yang dijadikan sebagai indikator dalam pengembangan konsep SDGs. Pilar tersebut terdiri dari pembangunan manusia (*Human Development*) yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan., Pembangunan sosial ekonomi (*Social Economic Development*) meliputi ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi, Pembangunan lingkungan (*Environmental Development*) meliputi ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik (Wahyuningsih, 2017).

2) Tujuan SDGs

Konsep SDGs dilakukan dengan berdasarkan tujuan yang sudah disusun sebelumnya. Tujuan SDGs terdiri dari 17 tujuan yang telah diusulkan yang mencakup isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan (Sutopo et al., 2014) yang meliputi:

1. Semua bentuk kemiskinan diakhiri
2. Kelaparan diakhiri, pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
3. Jaminan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disemua usia

4. Jaminan kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta kesempatan belajar seumur hidup untuk semua ditingkatkan
5. Mencapai kesetaraan gender dan melakukan perbedayaan perempuan serta anak perempuan
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur tangguh, promosi industrialisasi inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
10. Melakukan pengurangan ketimpangan dan antar negara
11. Menciptakan kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh, dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan segera untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan guna pembangunan berkelanjutan

15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi desertifikasi, menghentikan serta memulihkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses keadilan bagi semua, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan melakukan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari 17 tujuan yang terdapat di dalam konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan nomor 1 menjadi prioritas tujuan pembangunan di negara Indonesia. Tidak hanya pada lingkup negara, lembaga di bawahnya seperti pemerintah daerah juga dikerahkan dalam tujuan nomor 1 konsep SDGs ini untuk mengentaskan kemiskinan.

1.6.4. Pemerintah Daerah

1) Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah diartikan sebagai melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti mempunyai empat unsur yang terdiri dari dua pihak yaitu unsur yang diperintah adalah rakyat dan unsur yang memerintah adalah pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya terdapat hubungan (Syafiie, 2013). Menurut Mariana (dalam Ferdiansyah & Arsiyah, 2014). Pemerintah adalah ilmu yang mempelajari tentang cara supaya

dapat melakukan wewenang kekuasaannya guna dapat mengatur baik sistem yang ada di dalam institusi Pemerintah merupakan badan atau lembaga yang menyelenggarakan seluruh peraturan yang diberikan wewenang guna mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Palma, 2010).

Terkait munculnya regulasi tentang pembentukan pemerintah daerah yang tercantum di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut memiliki pemerintah daerah yang diatur di dalam undang-undang. Berdasarkan regulasi tersebut, dalam pasal 18 ayat 5 UUD 1945, pemerintah daerah adalah daerah otonom yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan seluas-luasnya dan berhak mengatur kewenangan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang diatur dengan undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang mengatur serta mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No 32 Tahun 2004, 2004). Penyelenggaraan pemerintah daerah mengacu pada asas otonomi dan asas tugas pembantuan, asas desentralisasi, dan asas dekonstralisasi.

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kepala daerah serta perangkat daerah otonom lain sebagai badan eksekutif daerah. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pemerintah daerah diartikan sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan melalui otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagai mana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah mencakup gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

2) Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah merupakan organisasi di dalam pemerintah daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga daerah/kecamatan/desa sesuai kebutuhan daerah (Negara, 2002). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berada di dalam perangkat daerah yang terbentuk karena adanya kepentingan pemerintahan yang harus ditangani.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perangkat daerah terdiri dari perangkat daerah provinsi yaitu

sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kalurahan.

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang organisasi perangkat daerah, ruang lingkup perangkat daerah kabupaten kota meliputi sekretariat daerah (unsur staf), sekretariat DPRD (unsur pelayanan terhadap DPRD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah), lembaga teknis daerah (unsur pendukung tugas kepala daerah), kecamatan (wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota) kalurahan (wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan) (PP No 41 Tahun 2017, 2007).

Berdasarkan peraturan tersebut lembaga teknis daerah menjadi unsur pendukung tugas yang dimiliki oleh kepala daerah. lembaga teknis daerah memiliki tugas untuk melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai lingkungannya, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Strategi

Strategi merupakan suatu cara untuk melakukan langkah ke depan guna mencapai tujuan untuk membangun visi dan misi organisasi, tujuan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai dan tepat sasaran.

1.7.3. Kemiskinan

Kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata penduduk di suatu wilayah adalah kemiskinan. Permasalahan kondisi tersebut ditandai dengan kapasitas penghasilan yang rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan

1.7.3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pemulihan kondisi lingkungan yang hancur tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial guna mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama.

1.7.4. Pemerintah Daerah

Menurut (Negara, 2002) pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati, dan walikota beserta perangkat daerah otonom lain sebagai badan eksekutif daerah. Sedangkan perangkat daerah merupakan organisasi di dalam pemerintah daerah yang membantu kepala daerah dalam

menyelenggarakan pemerintataan yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga daerah/kecamatan/desa sesuai kebutuhan daerah.

1.8. Definisi Operasional

Menurut (Sugiyono, 2014) definisi operasional merupakan seperangkat petunjuk lengkap terkait hal yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep guna menguji kesempurnaan. Sesuai dengan judul penelitian yang diteliti maka dapat diperoleh definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Strategi Organisasi	a. Perumusan strategi melalui visi dan misi	Visi dan misi sebagai acuan penyusunan strategi
	b. Perumusan visi dan misi ke dalam suatu program atau kegiatan	Visi dan misi sebagai acuan penyusunan program
Strategi Program	a. Fokus keterlibatan strategi	Keterlibatan TKPKD, OPD, masyarakat, <i>stakeholder</i> , swasta
	b. Aspek-aspek yang meliputi strategi program	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pembuatan program • Dampak positif bagi OPD dan masyarakat

Variabel	Indikator	Parameter
Strategi Pendukung Sumber Daya	a. Sarana dan prasarana	Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai program
	b. Sumber Daya Manusia	Kualitas TKPKD, OPD, <i>stakeholder</i>
	c. Sumber Daya Finansial	Ketercukupan dana TKPKD, Sumber dana TKPKD
Strategi Kelembagaan	a. Penguatan strategi lembaga dalam menghadapi permasalahan	Forum koordinasi lembaga
	b. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pembuatan SOP TKPKD, Regulasi TKPKD

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki perspektif deduktif-induktif yang mana dimulai dari kerangka teori, pendapat para ahli ataupun pemahan peneliti berdasarkan pengalaman yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan dan penyelesaiannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran/verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris (Harahap, 2020).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Menurut (Nazir, 1988) penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mempelajari permasalahan di dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku di masyarakat dan kondisi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, padangan yang sedang berlangsung, dan pengaruh dari suatu fenomena. Menurut (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menafsirkan dan menguraikan data yang diperoleh dengan kondisi yang sedang terjadi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena akan menghasilkan data berupa kata-kata baik secara lisan maupun tulisan dan berupa gambar serta sesuai dengan judul penelitian yang diteliti yaitu “Strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Untuk Memperkuat SDGs di Kabupaten Gunungkidul” untuk menganalisis berbagai macam data sesuai bentuk aslinya.

1.9.2. Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan unit analisis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul (BAPPEDA) tepatnya pada bagian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gunungkidul.

1.9.3. Jenis Data

- 1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung berdasarkan sumber penelitian dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara, dan lainnya (Harahap, 2020). Data primer diperoleh dari hasil wawancara baik rekaman maupun tulisan yang diperoleh dari sumber data.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung/orang lain dapat berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Harahap, 2020). Data sekunder dapat berupa laporan program, dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan monitoring dan evaluasi, dokumen kerjasama, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai jenis data yang sesuai dengan waktu, kondisi, biaya, dan pertimbangan lainnya (Nugrahani, 2014). Pada penelitian ini peneliti mencari sumber data tentang strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan guna mencapai tujuan SDGs. Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu:

1) Wawancara

Menurut (Nugrahani, 2014) wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan untuk mendapat informasi terkait penelitian melalui dua pihak atau lebih yang terdiri dari pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan terkait penelitian kepada responden atau narasumber. Berikut merupakan informan wawancara:

Tabel 1. 3 Narasumber

Narasumber	Jabatan	Nama Narasumber
Kepala TKPKD Kabupaten Gunungkidul	Wakil Bupati	Heri Susanto, S.Kom., M.Si.
Wakil Kepala Sekretariat TKPKD Kabupaten Gunungkidul	Kepala Subbidang Pemerintahan Bappeda	Ari Nur Aida, S.IP., M.E.
Kelompok Kerja TKPKD Kabupaten Gunungkidul	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Ir. Asti Wijayanti, MA.
Pemerintah Desa	Kepala Desa/Lurah Baleharjo	Agus Sulistyono, A.Md.

Masyarakat Desa	3 Masyarakat Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	1. Margiyem 2. Fitri 3. Sulasmi
-----------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengumpulan data untuk menemukan data historis melalui pengumpulan dokumen yang berupa arsip, teori, hukum, dan sebagainya sebagai sumber data sekunder penelitian (Yusuf, 2014). Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data atau dokumen terkait dengan strategi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul berupa undang-undang maupun peraturan daerah yang menjadi landasan lahirnya tim tersebut.

1.9.5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dari sumber data berupa studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi terkait penelitian. Menurut (Harahap, 2020) analisis data merupakan proses melakukan pencarian dan penyusunan data yang diperoleh baik dari wawancara, catatan lapangan, atau sumber yang lainnya secara sistematis sehingga dapat dipahami dan menjadi informasi bagi orang lain. Langkah-langkah dalam analisis data meliputi:

1) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi terkait penelitian. Pengumpulan data meliputi pemilihan dan penentuan dari narasumber.

2) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah menulis rangkuman, dan memilah hal pokok, fokus pada hal yang penting guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya (Abdussamad, 2021).

3) Mengolah Data

Pengolahan data dilakukan dengan memilah data yang sudah direduksi pada tahapan sebelumnya. Data yang sudah diolah tersebut akan digunakan pada tahapan selanjutnya di dalam penyajian data.

4) Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut (Abdussamad, 2021) penyajian data merupakan rangkaian informasi baik dalam bentuk narasi dengan mendeskripsikan berdasarkan inti temuan maupun berupa grafik, matrik, atau *chart* yang selanjutnya akan disajikan dalam laporan sistematis.

5) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Menurut (Harahap, 2020) inti singkat dari temuan yang memberikan gambaran pendapat-pendapat akhir berdasarkan pada uraian sebelumnya yang harus sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian. Temuan dapat berupa deskripsi

maupun gambaran obyek yang sebelumnya masih kurang jelas diteliti menjadi jelas.